

Jurnal Ilmu Sosial
Mamangan
Program Studi Pendidikan Sosiologi STKIP PGRI Sumatera Barat

Jurnal Ilmu Sosial Mamangan
Volume 5, Nomor 1, Januari-Juni 2016

EVALUASI PROYEK PEMBANGUNAN SOSIAL PADA KELOMPOK MASYARAKAT
KAWASAN HUTAN MBELILING, KAB. MANGGARAI BARAT, NTT

Penulis : Firdaus

Sumber : Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, Volume 5, Nomor 1, Januari-Juni 2016

Diterbitkan Oleh : Laboratorium Pendidikan Sosiologi, STKIP PGRI Sumatera Barat

Untuk Mengutip Artikel ini :

Firdaus, 2016. Evaluasi Proyek Pembangunan Sosial Pada Kelompok Masyarakat Kawasan Hutan Mbeliling, Kab. Manggarai Barat, NTT. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, Volume 5, Nomor 1, Januari-Juni 2016: 13-22.

Copyright © 2016, Jurnal Ilmu Sosial Mamangan
ISSN : 2301-8496 (*Print*), ISSN : 2503-1570 (*Online*)

Laboratorium Pendidikan Sosiologi
STKIP PGRI Sumatera Barat



EVALUASI PROYEK PEMBANGUNAN SOSIAL PADA KELOMPOK MASYARAKAT KAWASAN HUTAN MBELILING, KAB. MANGGARAI BARAT, NTT¹

Firdaus

STKIP PGRI Sumatera Barat, Indonesia
Email : firdaus@stkip-pgri-sumbar.ac.id

ABSTRACT

Social development concept has evolved over the last decades, especially post-criticism of physical development oriented. The social development are more social-oriented and prioritizing people through participatory approaches. This article discusses the evaluation of a Community as social development project in the Mbeliling forest area, West Manggarai. The community group founded by multi-stakeholders called Forum Masyarakat Peduli Kawasan Mbeliling (FKPM) is intended to social development around the forest area. After one year, the forum has been evaluated on a large multistakeholder meeting. The evaluation results show that the forum has not been able to answer the multistakeholder expectations against its founders. The problem of funding and coordinating are the main factors causing the inability of the forum to carry out the institution's mandate.

Keywords : *Social Development, FKPM, Social Project Evaluation*

ABSTRAK

Pasca kritik pembangunan berorientasi fisik berkembang beberapa dekade terakhir, berkembang konsep pembangunan sosial yang lebih berorientasi pada aspek sosial dan mengutamakan manusia melalui pendekatan partisipatif. Artikel membahas evaluasi terhadap proyek pembangunan sosial melalui kelompok masyarakat di kawasan hutan Mbeliling, Manggarai Barat. Kelompok masyarakat yang dibentuk oleh multifihak yang bernama Forum Masyarakat Peduli Kawasan Mbeliling (FKPM) tersebut ditujukan untuk pembangunan sosial kemasyarakatan di sekitar kawasan hutan. Setelah satu tahun didirikan, dilakukan evaluasi terhadap keberadaan forum. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa keberadaan kelompok belum mampu menjawab ekspektasi multistakeholder terhadap pendirinya. Ketiadaan dana dan sulitnya berkoordinasi menjadi faktor penyebab utama ketidakmampuan forum menjalankan mandat lembaga.

Kata Kunci: *Pembangunan Sosial, FKPM, Evaluasi Proyek Sosial*

¹ Data dalam paper merupakan bagian dari penelitian yang dibiayai oleh Burung Indonesia bekerjasama dengan DANIDA dan DOF.

PENDAHULUAN

Pembangunan telah menjadi bagian penting dalam dinamika perubahan ke arah yang lebih baik. Namun di berbagai kesempatan, banyak kalangan abai dalam memaknai substansi pembangunan yang pada intinya adalah upaya mengolah sumber daya alam dan manusia serta interaksi antara keduanya (Poerwanto, 2005), sehingga parameter pembangunan sering diukur hanya dari *output* secara fisik dengan menjadikan fisik sebagai ukuran. Pembangunan dinilai berhasil jika bangunan fisiknya sesuai dengan apa yang direncanakan, sebaliknya substansi pembangunan –untuk kehidupan manusia yang lebih baik secara ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain sebagainya- sering terabaikan. Dalam banyak kasus pembangunan aspek sosial banyak tidak menjadi perhatian. Sehingga tidak heran evaluasi terhadap model-model pembangunan dunia ketiga yang minim dalam pemberdayaan dan lebih mengutamakan pertumbuhan menunjukkan adanya suatu dimensi yang “tertinggal” dari proses pelaksanaannya (Chamber, 1987). Dimensi yang tertinggal itu bisa dari aspek sosial, budaya, psikologis, dan lain sebagainya. Hal ini kemudian yang menyebabkan pelaksanaan pembangunan menuai banyak kritik dari berbagai kelompok masyarakat.

Dalam perspektif pemberdayaan, dimensi sosial yang tertinggal tersebut terutama berhubungan dengan berbagai nilai-nilai lokal yang ada. Bagadion dan Korten misalnya mengatakan bahwa Evaluasi proyek-proyek pembangunan di seantero dunia menunjukkan bahwa masalah sosial dan kelembagaan sering tidak cukup mendapat perhatian (Cernea, 1988). Hal ini tentu merupakan salah satu bentuk kegagalan pembangunan sosial yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan fisik dan infrastruktur, meskipun di sisi lain pembangunan fisik dan infrastruktur juga penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan menguatkan aspek sosial kemasyarakatan. Oleh karenanya, seiring dengan pengalaman dan hasil evaluasi pembangunan, visi pembangunan nasional dewasa ini telah berusaha menempatkan manusia sebagai pusat perhatian.

Pembangunan ekonomi diyakini harus sejalan dengan pembangunan sosial, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat menyumbang langsung terhadap peningkatan kualitas kesejahteraan sosial, sebaliknya pembangunan sosial dapat menyumbang langsung terhadap pembangunan ekonomi. Pembangunan sosial terutama muncul sebagai solusi atas kegagalan pembangunan konvensional yang berorientasi pertumbuhan dan minim dalam mempertimbangkan aspek sosial kemasyarakatan. (Wirutomo, 2013).

Bersamaan dengan munculnya isu pembangunan sosial, kebijakan pembangunan yang dibuat dan dicanangkan lebih bersifat pemberdayaan dibanding pertumbuhan. Upaya-upaya pemberdayaan terutama bertujuan untuk pengembangan masyarakat yang berfungsi sebagai suatu basis untuk menangani banyak masalah sosial dalam masyarakat kontemporer. Pengembangan masyarakat dinilai lebih menjanjikan suatu solusi yang lebih mencakupi bagi banyak masalah sosial kontemporer yang paling menekan seperti penangguran, kemiskinan, kejahatan, kekerasan rumah tangga dan lain sebagainya (Ife & Tesoriero, 2014).

Seiring dengan berkembangnya pendekatan pemberdayaan dalam pembangunan, beberapa studi tentang pemberdayaan banyak dilakukan dalam upaya menyebarluaskan praktek pemberdayaan di berbagai tempat. Namun studi-studi tersebut mayoritas berkisar pada pemberdayaan sektor informal. Isu utama studi-studi tersebut terutama adalah pemberdayaan untuk meningkatkan ekonomi. Studi Deden Muhammad Haris misalnya, membahas tentang pengembangan usaha sektor informal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Studi ini lebih berfokus penanganan sektor informal di perkotaan (Haris, 2011). Studi ini lebih banyak menarasikan sektor informal dan kebijakan penanganannya oleh pemerintah ketimbang membahas upaya-upaya pemberdayaan terhadap sektor informal, yaitu pedagang kaki lima (PKL) yang menjadi fokus studi. Studi yang serupa, dilakukan Wauran tentang pemberdayaan sektor informal di kota Manado. Dalam pembahasannya, membahas pemberdayaan yang dilakukan oleh Bank BRI Unit terhadap

sektor informal dalam memberikan pinjaman (Wauran, 2012).

Studi lain dilakukan oleh Relawan, tentang pemberdayaan kelembagaan oleh PT. Telkom CDC terhadap UMK Mitra Binaan. Meskipun studi ini bertopik pemberdayaan kelembagaan, namun pembahasan lebih dominan pada penguatan kelembagaan dari lembaga usaha yang *unbankable* menjadi lembaga usaha yang *bankable* yang merupakan kendala umum yang dialami oleh UMK di Indonesia untuk mendapatkan dana bantuan modal dari lembaga perbankan (Relawan, 2014). Secara terperinci, Relawan telah mendeskripsikan proses pemberdayaan yang dilakukan oleh PT. Telkom terhadap UMK Mitra Binaan dan mengukur keberhasilan proses pemberdayaan tersebut dengan skala keberhasilan dalam pemberdayaan.

Studi lain, dan merupakan studi penting dalam penulisan artikel ini adalah tulisan Paulus Wirutomo dalam mendefinisikan pembangunan sosial. Dengan menceritakan sektor informal di kota Solo, Wirutomo mendefinisikan pembangunan sosial secara sosiologis dengan menekankan pembahasan pada tiga unsur utama dalam pembangunan masyarakat, yaitu struktur, kultur dan proses sosial (Wirutomo, 2013, 2014). Dalam artikelnya, Wirutomo kemudian mendefinisikan konsep pembangunan sosial dengan sebelumnya mengkritik pembangunan yang terlalu sektoral dan berorientasi pada pertumbuhan.

Konsep pembangunan sosial yang ditawarkan Wirutomo kemudian menjadi konsep penting dalam artikel ini. Dalam artikel ini penulis memilih pemberdayaan pada proses pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tapi juga pada proses pembangunan sosial yang berorientasi pada keberdayaan masyarakat dalam membangun struktur sosial baru untuk mengembalikan atau melahirkan yang menjadi kerangka acuan dalam proses sosial yang lain. Dengan pemahaman seperti demikian, artikel ini akan membahas proses pembangunan sosial melalui pembangunan kelompok masyarakat kawasan hutan yang dibangun oleh LSM untuk menjaga kelastarian alam. Meskipun muara dari proses pembangunan sosial tersebut adalah untuk peningkatan kesejahteraan, namun tujuan utama dari

pembentukan kelompok lebih kepada pelestarian hutan untuk peningkatan kesejahteraan ketimbang untuk kepentingan ekonomi semata. Selain itu, artikel ini akan berfokus pada pembahasan evaluasi terhadap protek pembangunan sosial melalui pembentukan kelompok.

METODE

Artikel ini ditulis dari catatan lapangan penulis selama melakukan *field work* untuk penelitian kearifan lokal dalam pengelolaan hutan di kawasan Mbeliling pada tahun 2009 yang didanai oleh Burung Indonesia. Dalam proses pengumpulan data penelitian, penulis dilibatkan dalam pertemuan besar Forum Peduli Kawasan Mbeliling (FPKM) yang dibentuk oleh stakeholder Mbeliling. Dalam pertemuan tersebut, penulis dilibatkan sebagai fasilitator untuk melakukan evaluasi perjalanan satu tahun forum. Data yang disajikan dalam artikel ini adalah poin-poin penting yang dihasilkan dalam diskusi kelompok dalam pelaksanaan evaluasi. Selain itu, data juga bersumber dari penelitian kualitatif yang penulis lakukan melalui wawancara, observasi dan studi dokumen untuk penelitian kearifan lokal. Secara keseluruhan, data yang disajikan merupakan data pada kegiatan penelitian tersebut dan setelahnya tidak ada pembaharuan terhadap data. Penambahan beberapa kajian ilmiah dalam penulisan ini adalah bagian dari studi akademik untuk melengkapi artikel ini sebagai artikel ilmiah.

PEMBANGUNAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN

Sakamoto menyebutkan bahwa definisi asli pembangunan sosial sejak 1960-an dan 1970-an menekankan pada infrastruktur sosial untuk mendukung pembangunan ekonomi. Konsep ini berhubungan dengan mainstream pembangunan selama periode ini yang berfokus pada pembangunan ekonomi. Barulah sejak akhir 1970-1980 konsep pembangunan sosial dimulai dengan melibatkan kepuasan BHN (*Basic Human Needs*) menggunakan strategi pembangunan baru dengan partisipasi. Tujuan pembangunan sosial adalah upaya pengurangan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja dan integrasi sosial

(Sakamoto, 2003). Pembangunan sosial, dengan mengacu pada apa yang disebutkan oleh Sakamoto haruslah dilakukan sebagai suatu pendekatan terencana dan sistematis dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial, dengan memberikan respons terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat melalui pemberdayaan yang melibatkan partisipasi mereka. Dalam hal ini, masyarakat bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan, menetapkan prioritas dalam lingkup, dan memantau serta mengevaluasi program-program yang dikenal dengan istilah pengembangan masyarakat (Ife & Tesoriero, 2014).

Pengembangan masyarakat bukanlah tentang mendefinisikan dan menetapkan komunitas, tetapi lebih merupakan suatu proses dialog, pertukaran, peningkatan kesadaran, pendidikan dan aksi yang sedang berjalan dan kompleks yang bertujuan menolong orang-orang yang konsen membangun komunitas versi mereka sendiri (Ife & Tesoriero, 2014). Upaya membangun komunitas melalui pengembangan masyarakat sesungguhnya adalah bagian dari rekayasa proses sosial yang merupakan unsur penting dalam sistem sosial. Dari proses rekayasa proses sosial tersebut kemudian struktur dan kultur yang ada dalam masyarakat dipengaruhi. Hal inilah yang oleh Paulus Wirutomo disebut dengan pembangunan sosial yang menurutnya bukan sekedar memperbesar dan mempercepat output material atau ekonomi, tetapi bagaimana membangun ekonomi yang berakar pada elemen dasar kehidupan sosial masyarakat, yaitu struktur (keseimbangan hubungan kekuasaan menjadi lebih inklusif partisipatoris), kultur (sistem nilai yang mengangkat martabat kemanusiaan), proses sosial (ruang bebas untuk berekspresi, beraspirasi dan bernegosiasi) (Wirutomo, 2011, 2013).

Lebih lanjut, Wirutomo mengatakan bahwa pembangunan sosial dapat berlangsung melalui ketiga unsur penting dalam masyarakat (kultur, struktur dan kultur) secara satu persatu atau bersamaan (Wirutomo, 2011, 2013). Di kota Surakarta yang menjadi area studinya, proses pembangunan sosial dilakukan oleh pemerintah kota melalui kebijakan (struktur) dengan Perda No. 3 tahun 2008 tentang pengelolaan PKL. Berdasarkan Perda

tersebut pemerintah kota kemudian menata dan mengelola PKL di Kota Surakarta. Proses penataan dan pengelolaan tersebut kemudian berpengaruh terhadap sistem nilai dan sikap PKL, budaya berorganisasi dan partisipasi yang merupakan aspek kultural (Wirutomo, 2013). Melalui pembangunan struktur, pembangunan sosial sekaligus menjadi elemen yang ikut menjadi bagian dalam proses pembangunan sosial. Maka pembangunan sosial adalah pengembangan proses sosial yang juga sekaligus pengembangan kultur dan struktur sosial dimana semua anggota akan memiliki ruang sosial yang lebih untuk mengembangkan proses sosial (Hardjosoekarto, 2012).

Pembangunan sosial yang dikembangkan dalam komitmen KTT Sosial di Copenhagent pada tahun 1995 di luar aspek ekonomi antara lain adalah untuk menciptakan lingkungan ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum yang memungkinkan untuk pembangunan sosial (Sakamoto, 2003). Oleh karenanya pembangunan sosial harus dimulai melalui proses pemberdayaan masyarakat dalam memahami persoalan yang mereka hadapai. Dengan pemahaman terhadap persoalan hidup mereka, masyarakat akan mampu mendesain aktifitas ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap mempertimbangkan aspek-aspek sosial di lingkungan mereka. Pelaksanaan pembangunan dalam konteks ini perlu didekatkan pada situasi dan kondisi kehidupan masyarakat setempat. Pelaksanaan pembangunan perlu mengikuti mekanisme dari, oleh, serta dan untuk masyarakat yang oleh Chambers disebut pola pemberdayaan, yaitu sebuah konsep pembangunan yang merangkum nilai-nilai sosial dan mencerminkan *people centred*, *participatory*, *empowering* dan *sustainable*. Dan ini juga yang kemudian disebut dengan pembangunan yang berpusat pada rakyat (Chamber, 1987).

Konsep utama pembangunan yang berpusat pada rakyat cukup sederhana, karena merupakan pendekatan pembangunan yang memandang inisiatif kreatif rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembangunan. Kekurangan dasar dari model-model pembangunan yang

konvensional, baik yang sosial maupun yang kapitalis, adalah bahwa model tersebut terlalu memusatkan perhatian kepada produksi, sehingga kebutuhan sistem produksi lebih diutamakan dari kebutuhan rakyat (Susiana & Indahri, 2000). Dengan meminjam konsep pemberdayaan Korten (1993) yang pada intinya memberi peran kepada lapisan bawah dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan (Suherman, 2004), maka pemerintah hanya berperan untuk mengurangi hambatan dan kendala partisipasi masyarakat dalam menyusun program yang lebih memberi kesempatan kepada masyarakat untuk belajar dan berperan aktif dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya lokal yang ada. Dengan demikian, aspek terpenting dalam proses pemberdayaan –kesadaran untuk turut berpartisipasi dari dan oleh masyarakat- akan tumbuh dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dimaksudkan di sini adalah keterlibatan secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan kebijakan pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan (*decision maker*). Partisipasi menjadi penting karena tanpa partisipasi dari masyarakat sebuah perencanaan pembangunan sosial tidak akan berjalan secara optimal dengan tanpa ketrlibatan dan partisipasi penuh dari masyarakat.

Conyers (1994) menyebutkan bahwa pentingnya partisipasi pembangunan didasarkan kepada tiga alasan. Pertama, partisipasi merupakan alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat yang tanpa kehadirannya bisa gagal. Kedua, masyarakat bisa percaya dimana ia ikut dilibatkan dalam dalam tahap persiapan dan perencanaannya. Ketiga, bahwa partisipasi merupakan hak demokrasi masyarakat apabila ia dilibatkan dalam pembngnan masyarakat (Yusnen, 1997). Prettty & Guijt (1992) menyebutkan bahwa pendekatan pembangunan yang partisipatoris harus mulai dengan orang-orang yang paling mengetahui tentang sistem kehidupan mereka sendiri. Pendekatan ini harus menilai dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka, dan memberikan sarana yang perlu bagi mereka supaya dapat mengembangkan diri (Mikkelsen, 2011).

MONITORING DAN EVALUASI PROYEK SOSIAL

Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu sistem pendukung yang akan turut menentukan keberhasilan program pembangunan. Ia merupakan alat praktis yang harus menjadi bagian dalam suatu manajemen yang baik (Bamberger & Hewitt, 1986). Monitoring adalah suatu cara untuk mengetahui apakah suatu kegiatan berjalan sesuai atau sedekat mungkin dengan rencana serta menggunakan sumber daya secara tepat. Evaluasi adalah penilaian tentang bagaimana program dijalankan, apakah proses dan dampaknya sudah sesuai dengan yang diharapkan, serta mengecek faktor-faktor penghambat yang dihadapi, dan faktor-faktor pendukung yang dimiliki, untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, monitoring dan evaluasi adalah kegiatan untuk mengecek, mengawasi, dan menilai jalannya program mulai dari tahap sosialisasi dan orientasi awal, perencanaan, pelaksanaan konstruksi, hingga ke kegiatan penyelesaian pembangunan fisik dan pemeliharannya (UNDP, n.d.).

Monitoring merupakan aktifitas internal dalam suatu proyek untuk mengecek *pertama* apakah sumberdaya proyek dialokasikan dan digunakan sesuai peruntukan dan jadwal yang ditetapkan. *Kedua* apakah luaran yang ditargetkan terlaksana sesuai jadwal dan biaya yang efektif, dan *ketiga* untuk menilai efisiensi pelaksanaan project (Bamberger & Hewitt, 1986). Monitoring adalah pengecekan berkala terhadap perkembangan program melalui pengumpulan informasi secara rutin dan sistematis. Monitoring juga diartikan sebagai cara untuk mengetahui apakah suatu kegiatan berjalan sesuai atau sedekat mungkin dengan rencana serta menggunakan sumber daya secara tepat (UNDP, n.d.). Definisi monitoring bisa bervariasi, tetapi pada dasarnya prinsip yang digunakan adalah sama, yaitu penilaian yang terus menerus terhadap fungsi kegiatan-kegiatan proyek di dalam konteks jadwal-jadwal pelaksanaan dan terhadap penggunaan input-input proyek oleh kelompok sasaran di dalam konteks harapan-harapan rancangan. Monitoring merupakan kegiatan proyek yang integral, bagian penting dari praktek manajemen yang baik dan karena itu merupakan bagian yang integral dari

manajemen sehari-hari (Casely & Kumar, 1991).

Evaluasi adalah penilaian tentang bagaimana program dijalankan, apakah proses dan dampaknya sudah sesuai dengan yang diharapkan, serta mengecek faktor-faktor penghambat yang dihadapi, dan faktor-faktor pendukung yang dimiliki, untuk mencapai tujuan (UNDP, n.d.). Selain itu evaluasi adalah *assesment* dari manfaat program dengan mengukur dampak mereka terhadap pencapaian tujuan mereka, untuk memberitahu kita apakah program itu sukses dan bagaimana membuatnya lebih baik demi output yang diinginkan. Casely & Kumar (1991:2) mendefinisikan evaluasi sebagai penilaian berkala terhadap relevansi, prestasi, efisiensi, dan dampak proyek dalam konteks tujuan yang telah disepakati. Evaluasi biasanya menyangkut perbandingan-perbandingan yang memerlukan informasi dari luar proyek – tentang waktu, kawasan, atau populasi.

Evaluasi bertujuan untuk, *pertama* menilai sejauh mana dampak project yang ditargetkan telah tercapai dan *kedua* membandingkan efektivitas biaya yang digunakan dalam project dengan menggunakan alternatif-alternatif yang mungkin (Bamberger & Hewitt, 1986). Dengan demikian, dapat dikatakan monitoring dan evaluasi adalah kegiatan untuk mengecek, mengawasi, dan menilai jalannya program mulai dari tahap sosialisasi dan orientasi awal, perencanaan, pelaksanaan konstruksi, hingga ke kegiatan penyelesaian pembangunan fisik, pemeliharaan hingga manfaat yang dihasilkan oleh suatu pembangunan dalam kehidupan orang banyak. Namun demikian, evaluasi berbeda dengan monitoring, tapi relatif sangat dekat. Keduanya (monitoring dan evaluasi) adalah alat manajemen. Pada kasus monitoring, informasi untuk mengetahui kemajuan menurut yang disetujui sebelumnya di dalam rencana dan jadwal rutin yang dikumpulkan. Ketidakcocokan antara aktual dengan pelaksanaan yang direncanakan haruslah dilakukan identifikasi dan koreksi. Ketika ditemukan saat monitoring hasil pembangunan (*effect, impact*) kadang kala terjadi pada evaluasi berjalan (*on-going evaluation*). Dalam pembangunan sosial, evaluasi tidak hanya terfokus pada aspek

fisik yang dihasilkan dari sebuah rancangan pembangunan. Namun, sebuah pembangunan sosial mesti dievaluasi dari aspek sejauhmana upaya pembangunan sosial tersebut telah memberikan dampak positif bagi upaya perubahan sosial yang direncanakan yang didisain untuk mengangkat kesejahteraan penduduk secara menyeluruh.

FORUM PEDULI KAWASAN MBELILING (FPKM); PEMBANGUNAN SOSIAL MELALUI ORGANISASI MASYARAKAT

Hutan Mbeliling merupakan kawasan hutan yang terletak di Barat Daya Pulau Flores. Secara administratif termasuk ke dalam Kabupaten Manggarai Barat, sebuah kabupaten yang hasil pemekaran dari kabupaten Manggarai. Menurut data Burung Indonesia (2009) Hutan Mbeliling merupakan hutan tropis yang hanya berjarak kurang lebih 12-20 km arah tenggara ibukota kabuapten, Labuan Bajo. Lereng yang curam mendominasi topografi kawasan ini, dengan 60% area berada pada ketinggian antara 0-499 m, sisanya 35% pada ketinggian 500-1.000 m dan 5% di atas 1.000 m. Tipe hutan yang terdapat di dalam kawasan ini meliputi hutan tropika semi awet-hijau di atas batuan vulkanik yang terdapat pada ketinggian antara 400-1.100 m, hutan tropika basah luruh daun di atas batuan vulkanik pada ketinggian di bawah 400 m. Sungai Wae Ndeo mengalir melalui kawasan ini dan bermuara di Laut Sawu. Secara keseluruhan alokasi kategorikal kawasan hutan Mbeliling terdiri dari 7.624,083 Ha hutan konversi, 8.252,864 Ha hutan lindung, 13.079,183 Ha hutan produksi terbatas dan 1.456,230 Ha areal penggunaan lainnya. Secara administratif kawasan ini di kelilingi oleh 27 Desa yang tersebar di tiga kecamatan (Komodo, Sano Nggoang dan Lembor) (Firdaus, 2012).

Kawasan Mbeliling dan Sano Nggoang berperan sebagai tempat perlindungan bagi tumbuh-tumbuhan endemik dan spesies-spesies burung yang khas. Beberapa spesies diketahui memiliki hubungan dengan spesies di Kalimantan, Filipina, dan Irian dimasa lalu. Lebih dari 20 spesies tumbuhan baru telah dideskripsikan berdasarkan koleksi dari Mbeliling. Hingga saat ini spesies-spesies tersebut hanya dijumpai di kawasan ini, termasuk perwakilan dari marga-marga baru

untuk Nusa Tenggara (*Urobotrya florensis* dan *Sympetalandra schmutzii*) dan juga beberapa spesies pohon (*Helicia sp.* dan *Ternstroemia sp.*) serta beberapa spesies anggrek (*Corybas sp.* dan *Coelogyne sp.*) yang belum dapat dideskripsikan.

Hutan Mbeliling selain itu juga berperan untuk mempertahankan kualitas air dengan mengikat tanah dan mengurangi kerusakan tanah karena cuaca dan erosi. Hilangnya hutan atau meningkatnya degradasi hutan di Kawasan Mbeliling menyebabkan sungai-sungai kecil dan sungai-sungai besar yang mengalir ke Selat Rinca mengalami pendangkalan. Kondisi ini akan sangat merusak keanekaragaman terumbu karang di Kawasan Taman Nasional Komodo sekitar 20 km disebelah barat Labuan Bajo yang merupakan Situs Warisan Dunia (Firdaus, 2012). Mempertimbangkan fungsi hutan yang sangat penting dan acaman yang dihadapi hutan itu sendiri, melahirkan sebuah gagasan tentang pentingnya menjaga hutan dari kerusakan yang disebabkan oleh tangan manusia. Maka, dalam upaya tersebut pemerintah setempat (Manggarai Barat) bersama multipihak menggagas pemeliharaan hutan melalui masyarakat dengan membentuk forum yang tugas utamanya ada mendorong masyarakat untuk turut serta melestarikan hutan untuk kesejahteraan masyarakat banyak secara ekonomi dan sosial.

Kemudian berdasarkan kepedulian, kecintaan dan kepentingan para pihak di Manggarai Barat terhadap Kawasan Mbeliling, Forum Peduli Kawasan Mbeliling (FPKM) berdiri dan dideklarasikan pendiriannya pada tanggal 26 Juni 2008 di Aula Stella Maris-Labuan Bajo yang dilakukan melalui pertemuan multipihak. Multifihak dimaksud adalah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, LSM, tokoh masyarakat dan pemerintah Desa. Adapun visi dari FPKM adalah terwujudnya pengelolaan Kawasan Mbeliling yang menjamin kepentingan ekologis, ekonomis dan sosial budaya masyarakat sekitar Mbeliling khususnya dan Manggarai Barat pada umumnya. Dengan fokus kegiatan kesejahteraan masyarakat sekitar Kawasan Mbeliling dan kelestarian lingkungan, visi di atas kemudian diturunkan dalam bentuk misi, yaitu :

1. Bekerjasama dengan semua pihak terkait untuk mengelola dan melestarikan Kawasan Mbeliling.
2. Berupaya membangun pemahaman, kepedulian dan kecintaan pada kelestarian Kawasan Mbeliling.
3. Memberdayakan masyarakat disekitar kawasan Mbeliling dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
4. Meningkatkan peran institusi lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Dengan memepertimbangkan aspek sosial dalam mencapai visi pembangunan sosial dan ekonomi kemasyarakatan, FPKM memegang teguh prinsip-prinsip dasar sebagai berikut :

1. Mengakui dan menghargai keberadaan para pihak.
2. Anti kekerasan.
3. Senasib dan sepenanggungan (solider).
4. Musyawarah dan mufakat.
5. Bertanggungjawab.
6. Peduli terhadap masyarakat dan Kawasan Mbeliling.
7. Terbuka.
8. Berkelanjutan.
9. Kesetaraan dan keadilan.
10. Keswadayaan.
11. Suka rela.

EVALUASI PEMBANGUNAN SOSIAL MELALUI FPKM; MENGUKUR KEBERHASILAN MELALUI TINGKAT PARTISIPASI

Tanggal 26 Juni 2009, FPKM genap berusia satu tahun dan dilaksanakan pertemuan besar dalam rangka mengevaluasi satu tahun keberadaan forum di kawasan Mbeliling. Selain itu, pertemuan juga mendiskusikan tentang mekanisme dan aturan kontribusi pemeliharaan hutan bagi orang hulu yang selama ini memelihara hutan. Selain untuk kepentingan internal kelambagaan, forum juga membahas rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang kontribusi pemeliharaan pelestarian hutan oleh orang hulu. Peraturan tersebut antara lain mengatur tentang pengelolaa pembayaran oleh masyarakat di hilir yang selama ini memanfaatkan air yang dihasilkan

oleh hutan yang dipelihara oleh masyarakat di hulu. Dalam evaluasi, pertemuan besar juga membahas tentang kinerja forum dalam satu tahun sejak dideklarasikan. Dalam pertemuan muncul evaluasi dari peserta yang hadir tentang tidak berjalannya koordinasi dalam forum. Sehingga hal tersebut menjadikan forum yang meliputi 27 desa di kawasan Mbeliling tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dengan tidak adanya koordinasi antar sesama pengurus forum, secara otomatis forum juga belum melaksanakan serangkaian program kerja yang sudah dirancang setahun yang lalu.

Dalam diskusi kelompok yang dibagi per divisi yang ada (empat divisi)² hampir semua divisi menyebutkan bahwa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan roda organisasi dan tidak berjalannya komunikasi adalah disebabkan oleh persoalan finansial yang tidak ada dalam melaksanakan aktifitas organisasi. Kendala finansial menjadi kendala utama yang menyebabkan tidak berjalannya organisasi tersebut. Selain itu, sebaran pengurus yang berada di sekitar kawasan Mbeliling juga menjadi kendala yang menyebabkan renggangnya komunikasi. Namun, dalam kelompok juga mencuat bahwa kendala itu akan dapat diatasi dengan adanya kecukupan finansial.

Suatu pembangunan sosial sebagaimana telah disinggung di atas tidak dapat tidak harus memberikan sumbangan terhadap perubahan sosial. Perubahan sosial dimaksud adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan tersebut antara lain dapat diukur melalui partisipasi sosial dan kesejahteraan masyarakat dimana pembangunan sosial dilakukan. Untuk mengukur partisipasi sosial masyarakat dalam suatu pembangunan sosial perlu dilihat keterlibatan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan kebijakan pembangunan yang rencanakan baik oleh pemerintah maupun swasta. Adapun indikator yang dapat digunakan dalam melihat partisipasi dalam pembangunan sosial, terutama dalam pembentukan kelompok dalam kasus FPKM ini adalah sejauhmana keterlibatan aktif masyarakat sekitar hutan Mbeliling dalam

proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap forum dimaksud.

Dalam kasus FPKM, merujuk ke sejarah pendiriannya pada tahun 2008, keterlibatan masyarakat hanya pada level elitnya masyarakat dan pembentukan forum juga tidak diprakarsai oleh masyarakat pada level *grass root* sehingga terkesan forum hanya milik elit masyarakat (kepala desa, *tua golo* dan tokoh LSM). Sehingga partisipasi masyarakat lapisan bawah tidak terlihat. Ini kemudian yang menjadikan forum semakin tidak mampu mengambil partisipasi dari masyarakat. Dari hasil evaluasi dalam pertemuan satu tahun FPKM, yang menjadi kendala utama masyarakat dalam menjalankan roda organisasi adalah persoalan finansial. Sebagai organisasi sosial, dan didalamnya dituntut partisipasi sosial, semestinya persoalan finansial tidak menjadi kendala berarti bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Persoalan tersebut tentu dapat ditanggulangi dengan keswadayaan masyarakat dalam menjalankan aktifitas organisasi sosial yang mereka bangun.

Artinya, dengan masih menjadi kendala utama persoalan finansial bagi masyarakat dalam menjalankan organisasi, partisipasi belumlah optimal dalam tubuh masyarakat, dan pembangunan sosial dalam hal ini boleh dikatakan gagal. Hal tersebut dilihat dari pola dan sudut pandang masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan forum yang merupakan "milik" mereka. Di sisi lain, dengan adanya kecemburuan sosial dari masyarakat hulu terhadap masyarakat hilir yang hanya menikmati hasil air dari kegiatan mereka melestarikan hutan, dalam konteks ini pembangunan sosial juga mengalami kegagalan. Hal tersebut terutama dilihat dari sosial capital masyarakat yang melemah dengan mengukur aktifitas mereka dengan materi. Kesadaran masyarakat dalam memelihara hutan masih sebagai sebuah kesadaran semu karena tuntutan pemerintah atauran karena aturan hukum yang mengikat. Kesadaran yang sesungguhnya dalam memelihara hutan tidak muncul sebagai sebuah kesadaran bahwa mereka mempunyai kewajiban memelihara hutan karena mereka juga membutuhkan hutan pada hakikatnya.

Kemudian, di sisi lain upaya ke kesejahteraan masyarakat juga belum menampakkan hasil. Hal tersebut terlihat dari tingkat partisipasi masyarakat terhadap

² Dalam diskusi kelompok, penulis diminta untuk menjadi fasilitator kelompok yang membahas divisi pelayanan publik

forum. Forum baru mampu menghadirkan orang-orang yang ada pada level elit desa dan belum mampu masuk ke tingkat akar rumput dimana persoalan kesejahteraan menjadi persoalan utama. Dengan tidak adanya respon yang baik dari akar rumput, tentu hal ini menunjukkan bahwa upaya ke arah kesejahteraan masyarakat belum ada. Dimana, jika forum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tentu secara otomatis masyarakat akan turut berpartisipasi dengannya.

KESIMPULAN

Pembangunan mestilah memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat luas, karena betapapun secara filosofis pembangunan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat secara luas dan menyeluruh. Sehingga dengan demikian suatu pembangunan menjadi lebih tepat guna dan berdaya guna serta bermanfaat banyak bagi masyarakat. Tidak terkecuali pembangunan sosial, selain upaya membangun untuk malakukan perubahan sosial, ia harus menjadi faktor utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dengan demikian, antara sektor sosial dan sektor ekonomi dalam masyarakat terjasi keseimbangan (*equilibrium*)

Sebagai sebuah upaya pembangunan sosial, keberadaan FPKM belumlah mampu membawa perubahan sosial terutama dalam hal paradigma masyarakat terhadap aktifitas yang mereka lakukan dan kaitannya dengan forum yang ada. Hal tersebut terlihat dari bagaimana tingkat partisipasi baru pada level elit desa dan belum menyentuh ke tingkat akar rumput. Ke depan, FPKM perlu lebih kuat dalam sosialisai terhadap masyarakat akar rumput dengan memberikan upaya-upaya penyadaran terhadap masyarakat akan arti penting pelestarian hutan bagi kehidupan mereka. Karena betapapun, akar rumput adalah sektor dominan dalam pelastarian dan sekaligus pemanfaatan hutan

DAFTAR PUSTAKA

Bamberger, M., & Hewitt, E. (1986). *Monitoring and Evaluating Urban*

Development Programs; A Handbook for Program Manager and Researcher.

Washington DC: The World Bank.

Casely, D. J., & Kumar, K. (1991). *Pemantauan dan Evaluasi Proyek Pertanian.* Jakarta: UI Press.

Cernea, M. M. (1988). *Mengutamakan Manusia Dalam pembangunan, Variabel-variabel Sosiologi dalam Pembangunan.* Jakarta: UI-Presss.

Chamber, R. (1987). *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang.* Jakarta: LP3ES.

Firdaus. (2012). Puar Cama Untuk Anak Cucu: Kearifan Lokal Untuk Sustainability Forest di Manggarai Barat. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 1(1), 39–50.

Hardjosoekarto, S. (2012). Construction of Social Development Index as a Theoretical Research Practice in Action Research. *Systemic Practice and Action Research*, 25(6), 493–509. <http://doi.org/10.1007/s11213-012-9237-9>

Haris, D. M. (2011). Strategi Pengembangan Usaha Sektor Informal Dalam Kemiskinan Di Perkotaan. In *Simposium Nasional Otonomi Daerah* (pp. 239–245). Jakarta: LAB-ANE FISIP Untirta.

Ife, J., & Tesoriero, F. (2014). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mikkelsen, B. (2011). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan: Panduan Bagi Praktisi Lapangan.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Poerwanto, H. (2005). *Kebudayaan dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Relawan, I. N. (2014). Model Pemberdayaan Kelembagaan Usaha Miro & Kecil (UMK) Pada Unit Telkom CDC PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. *Sosiohumaniora*, 16(2), 156–164.

Sakamoto, K. (2003). *Social Development, Culture, and Participation: Toward Theorizing Endogenous Development in Tanzania.* Graduate School of Asia-Pacific Studies Waseda University (GSAPS).

Suherman. (2004). *Karakteristik Keluarga Miskin dan Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan:*

- Studi Kasus Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kecamatan Canduang Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat.* Universitas Andalas.
- Susiana, S., & Indahri, Y. (2000). *Pembangunan Sosial, Teori dan Implikasi Kebijakan.* Jakarta: Depertemen Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekjend DPR RI bekerjasama dengan Konrad Adenauer Stiftung.
- UNDP. (n.d.). Panduan ANSSP Volume 6-Monitoring dan Pengendalian. UN HABITAT.
- Wauran, P. C. (2012). Strategi Pemberdayaan Sektor Informal Perkotaan di Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah (PEKD)*, 7(3).
- Wirutomo, P. (2011). Social Development Policies on Informal Sector in Solo. *International Journal of Administrative & Arganization*, 18(2), 94–107.
- Wirutomo, P. (2013). Mencari Makna Pembangunan Sosial : Studi Kasus Sektor Informal di Kota Solo. *Masyarakat, Jurnal Sosiologi*, 18(1), 101–120.
- Wirutomo, P. (2014). Sociological Reconceptualization of Social Development: With Empirical Evidence from Surakarta City, Indonesia. *Asian Social Science*, 10(11), 283–293. <http://doi.org/10.5539/ass.v10n11p283>
- Yusnen. (1997). *Persepsi dan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Tingkat Nagari : Kasus Pada Nagari Ganggo Hilih dan Nagari Pauah di Kabupaten Pasaman Propinsi Sumatera Barat.* Universitas Andalas.